



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAMANHUDI
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 142236

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.444.250.000**

1. Tanah Seluas 10940 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI
Rp. 40.000.000
2. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI
Rp. 37.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA
SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 231 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL
SENDIRI Rp. 6.750.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/149 m2 di KAB / KOTA
KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 860.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 376.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 5.500.000
2. MOBIL, KIA PICANTO MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
55.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
19.000.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
275.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
21.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 14.050.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	53.308.828
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.887.608.828
III. HUTANG	Rp.	1.393.896.890
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	493.711.938

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.